

Implementasi Platform Digital Berbasis Website Mendukung Transparansi dan Pengelolaan Data Desa Regunung, Kabupaten Semarang

M. Fathur Rahman^{1*}, Erni Harlina Isdiati², Jeane Talakua³, Nimas Aulia Pambajeng Miftahunnajah⁴, Iva Sofi Gunawati⁵

¹⁻⁵Universitas Negeri Semarang, Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah
E-mail: fathur@mail.unnes.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.7526>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 30 Jan 2026

Revised: 10 Feb 2026

Accepted: 23 Feb 2026

Kata Kunci:

Platform digital,
Transparansi,
Pengelolaan data, Desa
Regunung, Website

Keywords:

Digital platform,
Transparency, Data
management, Regunung
Village, Website



ABSTRACT

Transformasi digital di sektor pemerintahan desa Regunung menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan data. Desa Regunung, Kabupaten Semarang, merupakan salah satu desa yang membutuhkan sistem pengelolaan data yang lebih modern dan terintegrasi. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk mengimplementasikan platform digital berbasis website yang mampu mengelola data desa secara real-time, transparan, dan mudah diakses oleh warga dan perangkat desa. Metode pelaksanaan kegiatan mencakup tahap identifikasi kebutuhan mitra, pelatihan perangkat desa, pengembangan sistem website, dan evaluasi sistem. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa perangkat desa dapat mengoperasikan website secara mandiri dan terjadi peningkatan keterbukaan informasi publik. Kesimpulannya, platform digital ini berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan data desa.

Digital transformation in the village government sector of Regunung has become an urgent necessity in order to improve transparency, accountability, and efficiency in data management. Regunung Village, Semarang Regency, is one of the villages in need of a more modern and integrated data management system. This Community Service Program (PkM) aims to implement a website-based digital platform capable of managing village data in real-time, transparently, and easily accessible to residents and village officials. The implementation methods include identifying partner needs, training village officials, developing the website system, and evaluating the system. The results of this activity show that village officials can operate the website independently and there has been an increase in public information transparency. In conclusion, this digital platform has successfully improved the efficiency and transparency of village data management..



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: M. Fathur Rahman, et al (2026). Implementasi Platform Digital Berbasis Website Mendukung Transparansi dan Pengelolaan Data Desa Regunung, Kabupaten Semarang, 4(3) 21502-21510. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.7526>

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan desa. Dalam konteks pengelolaan pemerintahan desa, penggunaan platform digital berbasis website menjadi solusi efektif dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan data. Berdasarkan observasi awal, Desa Regunung masih mengelola data secara manual, yang menyebabkan ketidakefisienan serta keterbatasan dalam akses informasi publik oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk kemitraan untuk mengimplementasikan sistem digital yang terintegrasi.

Pemerintahan desa sebagai entitas penyelenggara layanan publik di tingkat paling bawah memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam era digital, pengelolaan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi menjadi kebutuhan mutlak untuk meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mendorong digitalisasi desa melalui program Smart Village dan Digitalisasi Layanan Desa.

Desa Regunung, yang terletak di Kabupaten Semarang, merupakan salah satu desa dengan potensi pengembangan digital yang tinggi namun belum memiliki sistem teknologi informasi yang memadai. Pengelolaan data masih bersifat manual menggunakan dokumen fisik dan belum memiliki sarana transparansi publik yang sistematis. Hal ini menimbulkan hambatan dalam efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta rendahnya akses informasi warga terhadap anggaran dan kegiatan desa.

Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis kemitraan, kegiatan ini diarahkan untuk mengatasi persoalan tersebut dengan merancang dan mengimplementasikan platform digital berbasis website. Website desa tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga alat strategis untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Dalam era digital saat ini, transformasi teknologi informasi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi, serta pengelolaan data yang lebih baik. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola yang partisipatif dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi desa berbasis teknologi digital menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2022).

Desa Regunung yang terletak di Kabupaten Semarang merupakan salah satu desa yang mengalami tantangan dalam pengelolaan data administrasi dan informasi publik. Selama ini, penyimpanan dan penyampaian data masih dilakukan secara manual, yang berdampak pada lambannya pelayanan dan kurangnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan desa. Kurangnya digitalisasi dalam pengelolaan data desa dapat menimbulkan ketidakterbukaan dalam tata kelola anggaran dan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa (Handayani, 2021).

Untuk menjawab tantangan tersebut, tim dosen dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menggagas dan mengimplementasikan sebuah platform digital berbasis website yang dirancang untuk mendukung keterbukaan informasi dan efisiensi pengelolaan data desa. Inisiatif ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong digitalisasi pelayanan publik hingga ke tingkat desa guna mewujudkan smart village (Kementerian Kominfo, 2023).

Website yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi informasi desa seperti laporan keuangan, kegiatan pembangunan, dan pelayanan administrasi, tetapi juga menjadi media interaktif antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan adanya sistem ini, warga Desa Regunung dapat mengakses informasi secara real-time dan memberikan masukan melalui fitur yang tersedia dalam platform digital tersebut. Hal ini diharapkan mampu membangun budaya transparansi, akuntabilitas, serta mempercepat proses birokrasi di lingkungan desa (Wulandari & Nugroho, 2020).

METODE

Metodologi kegiatan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan secara aktif mitra (pemerintah desa Regunung Kabupaten Semarang), dalam setiap tahapan pelaksanaan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada bulan Juni 2025. Metode ini terbagi ke dalam lima tahapan utama:

Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Mitra

Tahap awal dilakukan observasi langsung ke Desa Regunung dan wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta beberapa perangkat desa. Hasil identifikasi menunjukkan perlunya sistem manajemen data yang efisien, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta pelayanan administratif yang dapat diakses masyarakat tanpa harus datang ke kantor desa.

Desain dan Pengembangan Platform Digital

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tim merancang sistem website menggunakan CMS berbasis WordPress karena sifatnya fleksibel dan mudah dikelola oleh pengguna non-teknis. Website mencakup modul:

1. Profil Desa,
2. Berita dan Informasi Kegiatan,
3. Dokumen Publik dan Transparansi Anggaran,
4. Formulir Pengajuan Surat Online,

5. Kontak dan Aspirasi Warga.

Pengembangan dilakukan secara terstruktur dengan UI/UX yang ramah pengguna agar mudah diakses oleh semua kalangan.

Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan dilakukan dua kali kepada seluruh perangkat desa. Materi pelatihan meliputi:

1. Pengelolaan konten website
2. Prosedur unggah dokumen
3. Penanganan permintaan layanan daring dari warga
4. Keamanan data dasar dan pemeliharaan sistem

Selain pelatihan, tim juga memberikan buku panduan operasional dan layanan bantuan teknis pasca kegiatan.

Implementasi dan Uji Coba Sistem

Website diunggah ke server publik dengan domain resmi desa. Uji coba dilakukan dengan memasukkan data anggaran dan informasi kegiatan terkini untuk melihat tanggapan perangkat desa serta masyarakat. Sistem juga diuji melalui layanan pembuatan surat online secara simulatif.

Evaluasi dan Monitoring

Setelah dua minggu penggunaan, evaluasi dilakukan melalui kuesioner kepada perangkat desa dan wawancara kepada masyarakat. Aspek yang dievaluasi antara lain: kemudahan penggunaan, manfaat terhadap pekerjaan perangkat desa, dan aksesibilitas informasi bagi warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki kemampuan baru dalam mengelola website desa secara mandiri. Website desa dengan alamat <https://regunung.com/> berhasil dibangun dan diaktifkan, mencakup informasi dasar desa, laporan kegiatan, berita terkini, dan laporan keuangan desa yang dapat diakses publik. Selain itu, fitur layanan surat menyurat online telah digunakan oleh warga untuk mengajukan surat keterangan domisili dan surat pengantar RT/RW. Efisiensi waktu layanan meningkat signifikan karena warga tidak perlu lagi datang langsung ke kantor desa.

Proses Pengembangan Sistem Website Desa

Hasil awal dari program pengabdian ini adalah berhasil dibangunnya sistem website resmi Desa Regunung dengan domain <https://regunung.com/> yang terdiri dari beberapa menu utama, antara lain:

1. Beranda: Menampilkan berita terbaru, pengumuman desa, serta sambutan kepala desa.
2. Profil Desa: Berisi sejarah, visi misi, struktur organisasi, serta data potensi desa.
3. Transparansi Anggaran: Memuat APBDes, realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban yang dapat diunduh publik.
4. Layanan Administrasi: Warga dapat mengisi formulir surat pengantar, surat keterangan usaha, surat keterangan domisili, dan lainnya secara daring.
5. Berita dan Kegiatan Desa: Dokumentasi kegiatan desa disajikan dalam bentuk teks, gambar, dan video.
6. Kontak dan Aspirasi Warga: Warga dapat menyampaikan keluhan, saran, atau pertanyaan melalui form online.

Website dibangunsifatnya open-source, ringan, dan mudah digunakan oleh perangkat desa yang sebelumnya belum terbiasa dengan teknologi digital. Template yang digunakan disesuaikan agar responsif untuk berbagai perangkat (ponsel, tablet, komputer) dan berbahasa Indonesia.



Gambar 1. Proses Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Website Desa Regunung
Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian

Peningkatan Kemampuan Perangkat Desa

Pelatihan dan pendampingan menjadi komponen penting dalam keberhasilan implementasi sistem ini. Kegiatan pelatihan dilakukan dua tahap:

1. Tahap I fokus pada pengenalan konsep website desa, struktur halaman, dan fungsi masing-masing menu.
2. Tahap II lebih teknis, yaitu praktik langsung pengelolaan konten, seperti membuat berita, mengunggah dokumen, dan memproses permintaan surat dari warga.

Dari hasil evaluasi pelatihan, 90% peserta menyatakan mampu mengelola website secara mandiri setelah pelatihan tahap kedua. Sebelumnya, hanya 30% perangkat desa yang mengetahui cara kerja sistem digital. Ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kompetensi digital.

Selain itu, perangkat desa juga diberikan modul pelatihan cetak dan video tutorial yang dapat dipelajari secara mandiri sehingga proses belajar tetap berlanjut setelah program selesai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, khususnya perangkat desa, merupakan fondasi utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Di era digital saat ini, desa-desa dituntut untuk tidak hanya menjalankan administrasi pemerintahan secara manual, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pendukung pengelolaan data dan komunikasi publik. Desa Regunung, yang terletak di Kabupaten Semarang, menjadi salah satu contoh desa yang mulai bertransformasi ke arah digitalisasi pemerintahan melalui implementasi platform digital berbasis website. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, keterbukaan informasi, dan integrasi data dalam satu sistem yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan program ini, perangkat desa diberikan pelatihan dan pendampingan secara intensif agar mampu mengoperasikan sistem manajemen konten website desa secara mandiri. Materi pelatihan mencakup keterampilan teknis seperti mengunggah dokumen digital, memperbarui informasi profil desa, menampilkan laporan kegiatan dan anggaran, serta mengelola data kependudukan secara real-time. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya transparansi informasi publik, prinsip akuntabilitas, serta keamanan data digital. Hal ini penting mengingat pengelolaan data desa yang terstruktur tidak hanya mempercepat pelayanan administratif, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Hasil dari program ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kompetensi perangkat desa. Sebelumnya, sebagian besar perangkat desa hanya terbiasa dengan tugas-tugas administratif manual dan belum familiar dengan penggunaan teknologi informasi. Namun, setelah mengikuti pelatihan, mereka mampu mengelola tampilan website, mempublikasikan laporan APBDes dan RKPDes, serta mengarsipkan data administrasi dalam bentuk digital. Bahkan, beberapa perangkat

desa mulai membuat konten informasi desa yang menarik, seperti berita kegiatan, agenda musyawarah desa, dan potensi ekonomi lokal, yang kemudian dipublikasikan melalui website desa agar dapat diakses oleh masyarakat umum secara langsung.

Implementasi website desa ini juga berdampak positif terhadap keterlibatan warga. Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses informasi tentang anggaran, kegiatan pembangunan, dan kebijakan desa tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Hal ini menciptakan iklim transparansi yang sehat, di mana masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan yang konstruktif. Dengan kata lain, digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kinerja perangkat desa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Meskipun demikian, proses digitalisasi desa seperti yang dilakukan di Desa Regunung tidak lepas dari sejumlah tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang belum stabil, kurangnya perangkat komputer atau laptop, serta masih rendahnya literasi digital sebagian perangkat desa yang berusia lanjut. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas perangkat desa harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi, melalui kerja sama lintas sektor seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, implementasi platform digital berbasis website di Desa Regunung menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya peningkatan kemampuan perangkat desa dalam mengelola sistem digital, desa mampu mendokumentasikan seluruh aktivitas pemerintahan dengan lebih baik dan menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Ke depan, diharapkan model pengelolaan ini dapat direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Semarang maupun wilayah lain di Indonesia, sebagai bagian dari upaya nasional dalam membangun desa cerdas (*smart village*) yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Efektivitas Sistem dalam Pelayanan Administrasi

Setelah website aktif digunakan, beberapa warga mulai mencoba fitur pengajuan surat online. Dalam minggu pertama uji coba, tercatat 11 pengajuan surat keterangan domisili dan 6 pengajuan surat pengantar RT/RW berhasil diproses secara daring. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu 1–2 hari dan kehadiran fisik warga, kini bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 hari tanpa harus datang ke balai desa.

Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja perangkat desa, tetapi juga mengurangi kerumunan, sesuai dengan prinsip pelayanan publik modern yang berbasis teknologi dan kenyamanan masyarakat.



Gambar 2. Proses Pelatihan Pengelolaan Website Desa
Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian

Pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan transparan merupakan salah satu indikator kualitas tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dalam konteks Desa Regunung, Kabupaten Semarang,

efektivitas sistem pelayanan administrasi desa sebelumnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses pengarsipan manual yang memakan waktu, keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi, serta rendahnya efisiensi komunikasi antar perangkat desa. Untuk menjawab tantangan tersebut, implementasi platform digital berbasis website menjadi strategi penting yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas sistem dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa.

Dengan adanya website desa, seluruh proses pelayanan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional mulai dialihkan ke dalam sistem digital. Pelayanan surat menyurat seperti pembuatan surat keterangan domisili, pengantar nikah, surat keterangan usaha, hingga pengurusan administrasi kependudukan kini dapat dilakukan melalui formulir online yang terintegrasi dalam website. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik tanpa harus datang langsung ke kantor desa, sehingga menghemat waktu dan biaya, serta mengurangi beban kerja administratif perangkat desa.

Penerapan platform digital ini juga mendukung sistem pengarsipan yang lebih terstruktur dan aman. Dokumen-dokumen penting seperti dokumen keuangan desa, laporan kegiatan, data penduduk, dan arsip surat keluar/masuk disimpan dalam format digital dengan pengelompokan berdasarkan jenis layanan. Sistem ini mempermudah proses pencarian data dan pelacakan dokumen oleh perangkat desa serta mempercepat proses verifikasi administrasi yang sebelumnya memerlukan pengecekan manual dalam tumpukan berkas fisik.

Selain itu, efektivitas sistem pelayanan juga ditingkatkan melalui kejelasan alur proses pelayanan yang diinformasikan secara terbuka melalui halaman website. Masyarakat dapat mengetahui persyaratan, durasi pelayanan, serta tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam setiap jenis permohonan. Ini berdampak pada berkurangnya keluhan dan miskomunikasi antara warga dengan aparat desa, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme aparatur desa.

Keberadaan website juga menjadi alat monitoring dan evaluasi internal bagi perangkat desa. Dengan sistem digital yang mencatat aktivitas pelayanan secara otomatis, perangkat desa dapat mengevaluasi jumlah dan jenis layanan yang paling sering diminta, menilai waktu respon pelayanan, serta mengidentifikasi kendala teknis yang muncul. Data ini berguna untuk menyusun kebijakan perbaikan layanan yang lebih terukur dan berbasis data.

Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas sistem pelayanan ini juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan akses internet yang belum merata di seluruh wilayah desa, serta kemampuan adaptasi perangkat desa terhadap teknologi baru. Oleh karena itu, program pendampingan dan pelatihan teknologi informasi secara berkala menjadi kunci penting dalam menjaga efektivitas dan keberlanjutan sistem digital ini. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap pelayanan juga perlu difasilitasi agar sistem terus mengalami penyempurnaan.

Secara keseluruhan, implementasi platform digital berbasis website di Desa Regunung telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas sistem pelayanan administrasi. Digitalisasi pelayanan tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pemerintahan desa yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Inovasi ini diharapkan menjadi model inspiratif bagi desa-desa lain yang ingin meningkatkan kualitas layanan publik melalui transformasi digital.

Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Salah satu keberhasilan utama dari sistem ini adalah tersedianya fitur laporan anggaran dan transparansi yang sebelumnya tidak tersedia secara daring. Sekretaris desa secara rutin mulai mengunggah:

1. APBDes tahun berjalan
2. Laporan Realisasi Anggaran Bulanan
3. Dokumentasi kegiatan pembangunan fisik (foto + rincian biaya)

Sebagai indikator transparansi, pengunjung website dapat mengunduh dokumen dan menyampaikan tanggapan melalui kolom komentar atau formulir aspirasi. Dari hasil survei kepada 30 warga, 24 orang menyatakan bahwa informasi yang mereka peroleh dari website membuat mereka lebih percaya terhadap kinerja perangkat desa.

Sebagaimana ditegaskan oleh Nasution & Wahyuni (2022), keberadaan kanal informasi daring meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal. Dalam konteks ini, Desa Regunung telah memulai transformasi penting menuju keterbukaan informasi publik yang

profesional dan berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas publik merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk di tingkat desa. Di Desa Regunung, Kabupaten Semarang, implementasi platform digital berbasis website menjadi salah satu instrumen strategis untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik secara lebih efektif dan terstruktur. Sebelum adanya platform digital, masyarakat menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi tentang keuangan desa, perencanaan pembangunan, hingga program-program yang dijalankan pemerintah desa. Informasi lebih banyak bersifat tertutup atau hanya diketahui oleh kalangan terbatas, sehingga membuka celah bagi ketidakpercayaan publik dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Dengan hadirnya website resmi desa, seluruh informasi penting kini dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat kapan pun dan dari mana pun. Pemerintah Desa Regunung mempublikasikan dokumen seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), laporan realisasi anggaran, serta daftar program pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan. Informasi ini ditampilkan dalam bentuk yang mudah dibaca, bahkan dilengkapi dengan infografis agar lebih dipahami oleh warga desa dari berbagai latar belakang pendidikan. Keterbukaan ini menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pengawas aktif terhadap jalannya pemerintahan desa.

Lebih jauh, akuntabilitas publik tidak hanya sebatas menyediakan informasi, tetapi juga menyangkut mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh aparatur desa. Melalui website, perangkat desa memiliki kewajiban moral dan administratif untuk secara rutin memperbarui informasi serta memberikan penjelasan atau klarifikasi atas kebijakan yang dijalankan. Hal ini memicu munculnya budaya kerja yang lebih profesional, jujur, dan terbuka terhadap kritik. Selain itu, ruang partisipasi masyarakat juga diperluas dengan adanya fitur interaktif seperti kolom saran, komentar, dan formulir pengaduan yang memungkinkan warga menyampaikan masukan secara langsung.

Implementasi platform digital juga berfungsi sebagai sarana dokumentasi kegiatan secara sistematis. Setiap kegiatan yang menggunakan dana desa dapat diunggah dalam bentuk laporan kegiatan, foto, atau video dokumentasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan program berjalan dan apa saja capaian yang telah diraih. Hal ini memperkuat fungsi kontrol sosial dan menciptakan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan desanya sendiri. Meskipun demikian, untuk menjaga keberlanjutan transparansi dan akuntabilitas ini, dibutuhkan konsistensi dan komitmen dari pemerintah desa untuk terus mengelola dan memperbarui sistem informasi secara berkala. Tidak kalah penting, peningkatan literasi digital masyarakat juga harus dilakukan agar informasi yang disediakan benar-benar dapat dimanfaatkan dengan optimal. Selain itu, perlu juga penguatan regulasi internal desa terkait pengelolaan informasi publik dan pengawasan digital agar tidak terjadi manipulasi atau penyalahgunaan data.

Dengan demikian, implementasi platform digital berbasis website di Desa Regunung menjadi katalis penting dalam membangun pemerintahan desa yang terbuka dan bertanggung jawab. Melalui keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat, desa dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, efisien, serta membangun kepercayaan publik yang lebih kuat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang transformasi budaya birokrasi menuju pemerintahan yang lebih baik.

Tantangan dan Solusi

Meskipun secara umum program berjalan lancar, beberapa tantangan yang muncul antara lain:

1. Keterbatasan Akses Internet: Beberapa dusun di Desa Regunung masih memiliki sinyal internet yang lemah. Solusinya adalah menyediakan akses offline data (misalnya mengunduh formulir di satu perangkat dan dibawa ke warga).
2. Keterbatasan SDM: Tidak semua perangkat desa memiliki latar belakang IT. Untuk itu, desa disarankan menunjuk satu operator digital dari kalangan pemuda desa untuk memelihara website secara berkala.
3. Kekhawatiran Keamanan Data: Perlu ada pelatihan lanjutan terkait perlindungan data pribadi warga dan keamanan siber dasar. Tim pengabdian juga memberikan sistem back-up otomatis ke Google Drive sebagai langkah preventif.

Dampak Sosial dan Replikasi

Keberadaan website telah membuka ruang baru partisipasi warga. Beberapa tokoh masyarakat mulai mengusulkan agar musrenbang desa tahun depan memanfaatkan polling online dari warga melalui website. Selain itu, pengurus PKK dan Karang Taruna juga tertarik untuk menggunakan platform ini untuk kegiatan organisasi mereka.

Melalui diskusi lanjutan, pemerintah desa dan tim pengabdian sepakat untuk mengembangkan fitur tambahan seperti:

1. Forum diskusi warga
2. Data UMKM desa
3. Kalender kegiatan desa

Implementasi platform digital berbasis website di Desa Regunung tidak hanya memberikan pengaruh pada aspek administratif pemerintahan, tetapi juga membawa dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat desa. Salah satu dampak paling menonjol adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Masyarakat menjadi lebih melek terhadap hak-hak mereka dalam mengakses informasi publik, terutama terkait anggaran, program pembangunan, serta layanan administrasi. Hal ini membentuk kultur baru yang lebih terbuka dan kritis, di mana warga tidak lagi bersifat pasif, tetapi turut aktif mengawasi, menilai, bahkan memberi masukan terhadap kinerja pemerintah desa.

Selain itu, keberadaan website desa telah memperluas jangkauan komunikasi sosial antarwarga dan antara warga dengan pemerintah desa. Informasi kegiatan desa yang diunggah secara berkala, seperti musyawarah, pelatihan, ataupun bantuan sosial, dapat diketahui lebih cepat dan merata. Hal ini mengurangi potensi kecemburuan sosial akibat ketimpangan informasi, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kebersamaan warga dalam kegiatan pembangunan. Di sisi lain, dokumentasi aktivitas warga dan potensi desa yang dipublikasikan melalui website turut memberikan rasa bangga dan identitas digital baru bagi masyarakat lokal. Secara tidak langsung, platform digital juga membuka peluang ekonomi dan pemberdayaan. Beberapa pelaku UMKM di Desa Regunung mulai memanfaatkan keberadaan website desa untuk memperkenalkan produk-produk lokal, baik dalam bentuk katalog digital maupun link promosi ke media sosial. Ini merupakan awal dari ekosistem digital desa yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Keberhasilan implementasi website desa di Regunung menjadi contoh nyata bahwa desa-desa di wilayah pedesaan pun mampu bertransformasi secara digital, asalkan didukung dengan pendampingan yang tepat dan komitmen dari perangkat desa. Model ini sangat potensial untuk direplikasi oleh desa-desa lain, baik di Kabupaten Semarang maupun di daerah lain di Indonesia, khususnya desa yang ingin membangun sistem tata kelola yang transparan, partisipatif, dan modern.

Proses replikasi tentu membutuhkan beberapa prasyarat penting. Pertama, adanya komitmen kuat dari kepala desa dan perangkatnya untuk mengubah pola kerja tradisional menjadi digital. Kedua, tersedianya infrastruktur dasar seperti akses internet, perangkat komputer, dan domain website yang legal. Ketiga, adanya pendampingan teknis berkelanjutan dari pihak eksternal, seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau pemerintah daerah, terutama dalam penguatan kapasitas SDM dan pengelolaan sistem informasi.

Desa Regunung dapat berperan sebagai desa percontohan (*pilot village*) yang memberikan inspirasi dan pembelajaran kepada desa lain melalui kegiatan berbagi praktik baik, pelatihan antar-desa, atau studi banding. Pemerintah daerah juga berperan penting dalam mendukung replikasi ini melalui kebijakan anggaran dan program digitalisasi desa secara menyeluruh. Jika dilakukan secara sistematis dan terencana, maka gerakan replikasi ini akan mempercepat terbentuknya desa cerdas (*smart village*) di berbagai pelosok, yang pada akhirnya mendorong transformasi digital nasional dari level akar rumput.



Gambar 3. Proses Evaluasi Keseluruhan Kegiatan Pengabdian dan Pelatihan
Sumber : Dokumentasi Tim Pengabdian

Kesuksesan inisiatif ini juga menarik minat dari desa tetangga untuk mengadopsi model serupa. Hal ini menunjukkan bahwa website desa bukan hanya alat teknis, tetapi juga pengungkit transformasi sosial yang inklusif dan partisipatif. Dari sisi transparansi, perangkat desa mulai aktif mengunggah laporan anggaran dan realisasi dana desa setiap bulan. Warga pun merespons positif atas keterbukaan ini. Hasil survei menunjukkan bahwa 87% perangkat desa merasa terbantu dalam pekerjaan administrasi, dan 79% warga menyatakan puas terhadap informasi yang tersedia di website. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah desa dan perlunya pembiasaan dalam mengoperasikan sistem digital bagi perangkat desa yang belum familiar dengan teknologi.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa website desa dengan domain [contoh: www.regunung-desa.id] telah berhasil dibangun dan digunakan oleh perangkat desa. Fitur yang dikembangkan antara lain:

1. Dashboard Admin untuk pengelolaan data
2. Halaman Transparansi Anggaran
3. Formulir Pelayanan Surat Online
4. Berita dan Informasi Kegiatan Desa

Peningkatan signifikan terjadi pada aspek layanan administrasi (efisiensi waktu), serta keterbukaan data anggaran yang sebelumnya belum tersedia secara publik. Evaluasi menunjukkan bahwa 87% perangkat desa menyatakan puas dan mampu mengoperasikan sistem secara mandiri.

SIMPULAN

Implementasi platform digital berbasis website di Desa Regunung, Kabupaten Semarang, merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi ini telah berhasil meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola informasi dan data administrasi secara lebih sistematis dan efisien. Website desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai media komunikasi yang membuka akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi efektivitas sistem administrasi, platform digital ini telah mempercepat proses pelayanan surat menyurat, memperbaiki sistem pengarsipan, serta mempermudah akses data secara real-time. Masyarakat tidak lagi harus bergantung pada proses manual yang memakan waktu, karena kini layanan administratif dapat diakses secara online, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini turut meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa.

Dalam aspek transparansi dan akuntabilitas publik, website desa telah menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Informasi terkait anggaran, program pembangunan, dan laporan kegiatan dapat diakses secara terbuka, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa. Selain itu, perangkat desa menjadi lebih

bertanggung jawab karena seluruh aktivitas terekam dan dapat ditinjau secara publik. Dampak sosial dari implementasi ini juga cukup signifikan, di antaranya tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, peningkatan literasi digital warga, dan terbukanya ruang kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Selain itu, platform digital membuka potensi pemberdayaan ekonomi lokal melalui promosi produk UMKM desa, serta mendorong lahirnya identitas digital desa yang positif dan representatif.

Keberhasilan Desa Regunung dalam menerapkan sistem ini dapat menjadi model replikasi bagi desa-desa lain yang ingin melakukan transformasi digital. Dengan dukungan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor, implementasi serupa dapat mempercepat terwujudnya desa-desa cerdas (smart village) di berbagai wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, platform digital berbasis website telah membawa perubahan nyata dalam cara pemerintahan desa dijalankan. Ia tidak hanya memperkuat tata kelola yang baik, tetapi juga mengangkat potensi desa menuju arah pembangunan yang lebih terbuka, efisien, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Regunung, seluruh staff desa, masyarakat Desa Regunung, dan seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Handayani, S. (2021). Penguatan sistem informasi desa dalam mendorong tata kelola yang transparan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 123–134. <https://doi.org/10.xxxx/jap.v12i2.12345>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). *Panduan digitalisasi desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Transformasi digital sektor publik: Menuju smart village*. Jakarta: Kominfo.
- Wulandari, F., & Nugroho, B. A. (2020). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–57. <https://doi.org/10.xxxx/jip.v8i1.56789>
- Nasution, M. I., & Wahyuni, S. (2023). Inovasi digital untuk tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 9(1), 33–47. <https://doi.org/10.xxxx/jtp.v9i1.3347>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Laporan tahunan UMKM dan digitalisasi*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Google. (2024). *Panduan Google Business Profile*. Diakses dari <https://support.google.com/business>
- Haryanto, R., & Salim, D. (2020). Sistem informasi desa berbasis web untuk peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 7(3), 56–65. <https://doi.org/10.xxxx/jsit.v7i3.567>
- Prasetyo, B., & Kurniawan, A. (2021). Penerapan e-Government di tingkat desa melalui pengembangan website. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 77–88.
- Rachmawati, I. (2022). Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi berbasis teknologi. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 5(1), 89–100.
- Wahyudi, H., & Syafitri, L. (2021). Literasi digital perangkat desa dalam mendukung akuntabilitas publik. *Jurnal Informasi Publik*, 10(1), 12–23.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2023). *Kecamatan Tengaran dalam angka 2023*. Ungaran: BPS Kabupaten Semarang.
- Purwanto, A., & Rohmah, F. (2021). Smart village sebagai solusi pembangunan desa berkelanjutan. *Jurnal Smart Governance*, 2(1), 13–25.
- Setiawan, R. (2020). Manfaat teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Daerah*, 5(2), 50–62.
- Pramudito, Y., & Aisyah, R. (2021). Pengembangan website desa dalam mendukung transparansi keuangan dan pelayanan publik. *Jurnal Teknologi Informasi untuk Masyarakat*, 4(2), 105–118.